



PETANI DI DESA JEMBAYAN TENGAH SUKSES KEMBANGKAN VARIAN SINGKONG BARU



**16 Kegiatan Pembangunan Telah Berjalan
di Desa Loa Janan Ulu Sepanjang Tahun 2023**



Singkong Selingkuh, hasil panen petani di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu. (Istimewa)

PETANI DI DESA JEMBAYAN TENGAH SUKSES KEMBANGKAN VARIAN SINGKONG BARU

TENGGARONG- Petani di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, sukses ciptakan varian singkong baru. Hasil persilangan singkong gajah dan pacar, singkong hasil silangan petani di Dusun Tudungan ini diberi nama singkong selingkuh.

Singkong selingkuh ini pun cukup tenar dikalangan pecinta singkong. Bahkan tak sedikit orang yang sengaja datang ke Dusun Tudungan, untuk mencicipi singkong tersebut.

Kini kunjungan ke lokasi tanam Singkong Selingkuh sudah dijadikan paket wisata lokal desa. Dengan paket wisata bawa pulang singkong hingga makan di lokasi dengan berbagai olahan berbahan singkong.

"Kami punya singkong Selingkuh di Dusun Tudungan," sebut Kepala Desa Jembayan Tengah, Masnur, Selasa (7/11/2023).

Untuk menuju Dusun Tudungan ditempuh dari Kantor Camat Loa Kulu membutuhkan jarak tempuh sekitar 10 km. Masnur mengklaim sudah banyak yang berkunjung ke Dusun Tudungan guna menikmati enakannya singkong selingkuh.

"Ada saja yang datang untuk menikmati Singkong Selingkuh. Dusun Tudungan merupakan sentra pertanian Desa Jembayan Tengah mulai terdapat beras, sayur mayur

dan hortikultura," tambahnya.

Selain punya hasil pertanian andalan berupa Singkong Selingkuh, ada lagi satu produk berupa Madu Kelulut yang juga menjadi andalan desa. Madu tersebut akan terasa nikmat jika dicampur dengan kopi khas Desa Jembayan Tengah.

Bahkan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kepala DPMD Kukar Arianto, serta para ulama di Tenggarong sudah pernah menikmati kopi campur madu kelulut khas Dusun Tudungan. "Dulu kami punya tanaman kopi sendiri, namun tidak produksi secara massal. Madu kelulut biasanya dicampur dengan kopi biasa atau sasetan," terangnya.

Masnur yang berlatar belakang guru ini mengaku, pihaknya masih harus berjuang keras membenahi pembangunan karena sebagian wilayah Desa Jembayan kesulitan mendapatkan air bersih, terkhusus di Dusun Tudungan.

Dirinya merencanakan akan membangun program Pamsimas dengan memanfaatkan sumber air bersih yang ada. "Kami rencanakan sumber airnya berasal dari eks tambang milik perusahaan yang airnya masih layak konsumsi," tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kades Loh Sumber, Sukirno. (Istimewa)

Sejumlah Ruas Jalan di Desa Loh Sumber Sedang Dilakukan Perbaikan

TENGGARONG- Pemerintah Desa (Pemdes) Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan di pemukiman masyarakat. Jalan ini juga merupakan jalan yang menghubungkan empat desa lain di sekitar Desa Loh Sumber, Selasa (7/11/2023).

Kepala Desa (Kades) Loh Sumber, Sukirno, mengatakan perbaikan jalan ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jalan. Proses perbaikan jalan sendiri saat ini tengah berjalan, total ruas jalan yang akan dikerjakan mencapai 600 meter. Pengerjaan jalan sendiri dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar).

"Perbaikan ini juga terealisasi berkat dukungan dari banyak pihak dan koordinasi yang baik antara desa dan dinas," ungkap Sukirno.

Ia menambahkan, perbaikan jalan tersebut dilakukan di dua RT, yaitu RT 5 dan RT 6 di Desa Loh Sumber. Ruas jalan tersebut juga berfungsi sebagai salah satu penghubung empat desa yang berbeda. Yaitu antara Desa Loh Sumber, Jembayan Dalam, Long Anai, hingga Sungai Payang.

"Tahun kemarin, kami juga telah melaku-

kan pengecoran spot-spot di jalan poros Desa Loh Sumber, dan pekerjaan ini adalah kelanjutannya," urainya.

Sukirno mengatakan, peningkatan infrastruktur jalan desa menjadi salah satu fokus pekerjaan pihaknya. Meskipun begitu, pihak desa tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan atau perbaikan seluruh jalan desa sekaligus.

Pasalnya, menurut Sukirno, anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan desa bersumber dari pemerintah daerah, dan anggarannya terbatas. Namun, Sukirno berjanji akan terus berkoordinasi dengan Dinas PU Kukar untuk melanjutkan peningkatan sejumlah ruas jalan desa.

Selain itu, mereka berharap agar seluruh jalan desa dapat ditingkatkan melalui semenisasi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni pada 2024 mendatang.

"Yang jelas, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara luas, sesuai dengan program bupati Kukar," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kades Loa Janan Ulu, Supariyo. (Istimewa)

16 Kegiatan Pembangunan Telah Berjalan di Desa Loa Janan Ulu Sepanjang Tahun 2023

TENGGARONG - Pemerintah Desa (Pendes) Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, terus melakukan perbaikan berbagai sarana dan prasarana umum. Sepanjang 2023, setidaknya ada 16 kegiatan pembangunan yang berjalan di Desa Loa Janan Ulu.

Kepala Desa (Kades) Loa Janan Ulu, Supariyo, mengatakan peningkatan infrastruktur di wilayah desa merupakan salah satu prioritasnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman pada setiap penduduk.

Supariyo menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur melibatkan sejumlah aspek, seperti peningkatan kualitas jalan dan gang di beberapa Rukun Tetangga (RT), rehabilitasi jembatan, serta peningkatan irigasi dan drainase di lingkungan pemukiman warga.

Selain itu, bantuan sosial seperti rehabilitasi rumah juga telah disalurkan oleh pendes. Dengan total tiga unit rumah warga yang sudah direhabilitasi. "Semua kegiatan ini didanai menggunakan Dana Desa (DD)

dan Alokasi Dana Desa (ADD)," kata Supariyo, Selasa (7/11/2023).

Supariyo menegaskan bahwa seluruh peningkatan infrastruktur ini memang dibutuhkan oleh warga desa. Sebagai contoh, pembangunan saluran drainase akan berfungsi sebagai saluran pembuangan air, termasuk limbah cair rumah tangga, sambil mengendalikannya banjir.

Selain itu, rehabilitasi rumah akan membantu meningkatkan taraf hidup yang layak bagi warga, sementara peningkatan infrastruktur jalan akan meningkatkan aksesibilitas warga. Hal ini khususnya menguntungkan para pelajar yang akan lebih mudah pergi ke sekolah.

"Infrastruktur jalan memiliki manfaat dalam memperlancar perekonomian, pendidikan dan khususnya bagi anak-anak sekolah," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



PEMKAB PPU RENCANAKAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH 2024 NAIK 100 PERSEN



TINDAKLANJUTI PENGEMBANGAN PUSAT
HIBURAN RAKYAT PPU, MAKMUR AJAK
CALON PENGEMBANG TINJAU LOKASI



Bimtek yang digelar selama 3 hari ini diikuti oleh ratusan pegawai yang digelar di Hotel IKA Petung, Selasa (7/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU RENCANAKAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH 2024 NAIK 100 PERSEN

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat di 2024. Mengingat masih banyak potensi pendapatan yang masih dapat dimaksimalkan lagi.

Ia membuka secara resmi bimbingan teknis (Bimtek) bagi petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kelurahan/desa berbasis Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) se PPU yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Selasa (07/11/2023). Para peserta Bimtek itu juga akan dipersiapkan pemberlakuan OPSEN Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Nantinya pada tanggal 5 Januari 2024 itu akan memakai pajak redistribusi menggunakan 1 perda (peraturan daerah) saja. Tadinya itu banyak sekali Perda, bahkan setiap ini itu perda-perda, sekarang hanya Kita gunakan 1 perda. Oleh karena itu karena 1 perdanya tentu akan berubah sistem aplikasi yang dipakai selama ini, tentu berubah semua ada yang baru," ungkapnya.

Kegiatan itu akan berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel IKA selama tiga hari (7-9/11/2023). Diikuti kurang lebih 100 peserta perwakilan masing masing dari kelurahan/desa yang nantinya akan dibagi menjadi 2 gelombang.

Pada kesempatan itu pula, ia juga menjelaskan Bimtek ini dilakukan dalam rangka

peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk keterampilan maupun penguasaan pengetahuan teknis bagi petugas PBB-P2 kelurahan/desa se-PPU mengenai Aplikasi SISMIOP. Para petugas PBB-P2 ini nantinya akan dipersiapkan untuk pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB terkait pengelolaan pajak daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Nah kalau itu tidak mempunyai sistem masih pakai manual sampai kriting pun gak akan selesai itu karena tidak pakai sistem. Tapi kalau pakai sistem sudah diatur didalamnya seperti bagaimana pembagiannya ke provinsi, ke kabupaten/kota beda lagi nanti untuk mineral/logam akan lagi itu nantinya. Kalau dia tidak mengerti Opsen itu apa, nantinya malah diambil dia semua," jelas Makmur.

Adapun mengenai target pendapatan untuk di PPU pada 2024 harus bisa naik 100 persen. Dari 125 miliar pendapatan sebelumnya harus meningkat menjadi 250 miliar. Sebab PPU ini sangat banyak potensi-potensinya yang harus ditingkatkan terlebih dari sisi destinasi wisatanya.

"Target pendapatan bukan naik mungkin harus lebih dari 100 persen, syukur-syukur kalau bisa naiknya menjadi 150 persen. Bisa apa enggak ya? Ya tentu harus bisa karena Bapenda harus berkeaktifan dipaksa mereka untuk melihat peluang-peluang mau pun potensi yang ada di Kabupaten PPU," tutupnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun bersama dengan seluruh pengurus parpol yang ada di PPU, Selasa (7/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

SILATURAHMI DENGAN PENGURUS PARPOL DI PPU, MAKMUR AJAK IKRAR PEMILU DAMAI

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memanggil pengurus partai politik (parpol) yang ada di wilayahnya, Selasa (7/11/2023). Dalam agenda silaturahmi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, digelar di Ruang Rapat Bupati PPU.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan kebijakan nasional yang telah menetapkan bahwa PPU menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN). Membuat masyarakat di seluruh daerah di Indonesia bahkan masyarakat dunia memberi perhatian pada daerah berjuduk Benuo Taka ini.

“Untuk itu, permasalahan yang mungkin timbul, harus Kita sikapi dengan kewaspadaan karena ancamannya senantiasa ada. Jika Kita lengah, maka Kabupaten PPU yang sementara ini tentram dan damai akan terusik dengan timbulnya konflik, pertikaian dan tindakan anarkis lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat,”ungkapnya.

Hal ini berkaitan pula dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 sudah di depan mata. Tentu situasi dan es-

kalasi politik mulai saat ini mengalami peningkatan. Keadaan ini tentu akan berdampak pula terhadap situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

“Saya selaku kepala daerah yang diberi tugas oleh Kemendagri, 24 jam siap untuk diskusi bersama, untuk ikut menghadapi persoalan yang dihadapi parpol karena lebih baik kita mendeteksi dini hal-hal yang tidak diketahui apa yang akan terjadi, dari pada menyelesaikan persoalan yang telah terjadi,” ungap Makmur.

Lebih lanjut, ia berencana akan melaksanakan Ikrar Pemilu Damai pada 15 November 2023 mendatang. Dala hai ini, ia mengajak untuk bersama-sama menunjukkan bahwa PPU merupakan kabupaten yang cinta damai dan tenang.

“Melalui silaturahmi ini mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk berkomitmen menjaga keharmonisan, keamanan dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten PPU yang tercinta ini,” pungkasnya. (ADV/SBK)



Foto bersama tim verifikasi Kementerian PPPA dan jajaran Pemkab PPU, Selasa (7/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU IKUTI VERIFIKASI LAPANGAN EVALUASI PUG 2023

PPU - Pemkab Penajam Paser utara (PPU) menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan (VL) evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Indonesia di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Selasa (7/11/2023). Kegiatan ini merupakan lanjutan evaluasi PUG tahap pertama yaitu evaluasi mandiri (EM) dan tahap kedua yaitu verifikasi administrasi.

"Semoga kehadirannya dapat memotivasi bagi kami dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan di PPU," ujarnya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Ahmad Usman.

Selain melaksanakan kegiatan, juga harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang responsif gender. Di antaranya ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, juga menyiapkan kursi roda dan lainnya untuk penyandang disabilitas.

"Saya mengimbau agar perangkat daerah yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam proses verifikasi lapangan agar dapat melaksanakan proses verifikasi dengan

sebaik-baiknya agar PPU dapat memperoleh prestasi," terangnya.

Lebih lanjut Usman mengatakan bahwa semua harus bergerak aktif dan mengikuti semua proses dengan sebaik-baiknya. Hal ini demi mencapai target prestasi tertinggi dalam menyukkseskan program ini.

"Kita berharap bisa kembali mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan dapat meningkatkan kategorinya yang semula Pratama menjadi Madya," sebutnya.

Pada kesempatan itu pula, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelibang) PPU terhadap berjalannya kegiatan ini. Pun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU sebagai driver PUG.

"Semoga semua kegiatan di seluruh perangkat daerah dapat terus dilaksanakan, strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Baik itu antara perempuan dan laki-laki hingga perlindungan anak harus terwujud sesuai dengan visi dan misi," pungkas Usman. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membawa calon pengembang meninjau lokasi kawasan Stadion Panglima Sentik, Selasa (7/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

TINDAKLANJUTI PENGEMBANGAN PUSAT HIBURAN RAKYAT PPU, MAKMUR AJAK CALON PENGEMBANG TINJAU LOKASI

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengajak calon pengembang usaha untuk meninjau beberapa lokasi, Selasa (7/11/2023). Yaitu General Manager (GM) Balikpapan Super Blok (BSB), Yudhi Saharudin dan Owner Kopi Daeng, Harun dalam rencana mengembangkan sektor UMKM di Benuo Taka.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, saat Makmur mengundang keduanya untuk datang di Pekan Raya UMKM Serambi Nusantara, Sabtu malam 4 November lalu. Gelaran rutin yang digelar di Alun-Alun depan Kantor Bupati PPU ini menjadi wadah ratusan pelaku UMKM dan pegiat seni tiap akhir pekan.

"Kemarin malam Minggu, beliau sudah datang. Beliau memberi perhatian untuk Kabupaten ini. Beliau sangat tertarik dengan adanya kegiatan itu, melihat bahwa ini ada yang menjanjikan di sini dan perlu dikembangkan," ungkap Makmur.

Dari pertemuan itu, ada kesamaan ide untuk mengembangkan satu tempat alterna-

tif hiburan rakyat yang dapat menjadi pusat kunjungan masyarakat. Baik itu untuk warga lokal, pun untuk warga dari luar daerah.

"Kami mencoba cari tempatnya yang pas. Jadi tidak lagi harus datang ke Balikpapan, atau ke Grogot, tapi sudah ada di sini," sebutnya.

Beberapa tempat yang ditinjau itu, di antaranya ialah kawasan di depan Stadion Panglima Sentik, kawasan Islamic Center PPU, dan beberapa lokasi lainnya. Ia berharap, rencana mewujudkan itu dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

"Saya minta ke beliau dalam waktu dekat. Tidak boleh PHP, ternyata sama maunya juga cepat. Makanya gayung bersambut. Semoga saja dapat terwujud dengan cepat," kata Makmur.

Ia bahkan menargetkan semua itu bisa segera direalisasikan pada tahun ini. "Saya mau tahun ini, tidak mau tahun depan. Kalau bisa bulan ini, atau minggu ini," tutupnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat memimpin apel petugas 3 OPD di Halaman Kantor Bupati PPU, Selasa (7/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

KUMPULKAN PETUGAS PEMADAM PERHUBUNGAN DAN BPBD, MAKMUR; JANGAN PERTARUHKAN KESELAMATAN MASYARAKAT

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun meminta seluruh pegawai yang bekerja di lapangan untuk maksimal melayani masyarakat. Hal itu ia sampaikan pada saat memimpin apel personel 3 organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki fungsi strategis, yang digelar di halaman Kantor Bupati PPU, Selasa (7/11/2023).

Yakni Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU). Makmur berpesan untuk mengedepankan keselamatan warga dalam setiap menangani setiap tugas yang diemban.

"Jangan sekali-kali Kita mempertaruhkan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi atau golongan. Harus selalu siaga selama 24 jam, sehingga ketika dibutuhkan, masyarakat tidak kesulitan untuk segera mendapatkan bantuan," tegasnya.

Kemudian menjalankan dengan serius semua urusan pemerintahan di bidang perhubungan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keutamaan tugas ini penting, terlebih seringkali bertemu dengan situasi yang tidak terduga

"Damkar (DPKP), BPBD dan Dishub ini kan OPD yang memang selalu bersentuhan dengan masyarakat, harus standby. Ketika dibutuhkan masyarakat ya mereka harus siap. Karena jika terlambat sebentar saja semua-

ya bisa fatal," sambungnya.

Bukan tanpa alasan. Sebab Makmur pernah mengalami kesulitan menghubungi petugas pemadam pada kejadian kebakaran di Penajam, Senin, 6 November kemarin. Bahkan saat itu dirinya hadir lebih dulu di lokasi kejadian, ketimbang petugas yang seharusnya lebih dulu di tempat itu.

"Saat itu Saya coba menghubungi Damkar wilayah Petung, tetapi tidak diangkat. Petugas Dishub juga tidak ada satu pun mengatur jalan, sehingga Saya sendiri yang harus membantu mengatur jalan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia tidak menginginkan hal ini berulang lagi ke depannya. Pun upaya itu menjadi hal yang mampu menjaga nama baik korp atau satuan.

"Mereka harus bisa saling mengingatkan satu sama lain, jangan sampai masyarakat yang justru menilai buruk kepada OPD yang ada di PPU. Jangan sampai gara-gara satu orang tidak disiplin semua orang ikut menanggung akibatnya karena stigma negatif dari masyarakat," ungkap Makmur.

Lebih lanjut, ia juga menyadari perlunya peningkatan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung. Mulai armada hingga peralatan pendukung lainnya.

"Karena kalau sudah terjadi kebakaran tidak ada waktu lagi bagi kita. Bahkan dalam hitungan menit saja sudah bisa menghancurkan bangunan. Kalau kita tidak sigap bagaimana," tutupnya. (ADV/SBK)



DORONG KEMANDIRIAN PETANI, PROGRAM MAKMUR PUPUK KALTIM DONGKRAK HASIL PADI PINRANG HINGGA 9,1 TON PER HEKTARE

BACA HALAMAN A2



ELNINO JADI KENDALA PROGRAM WOLBACHIA

Dorong Kemandirian Petani, Program Makmur Pupuk Kaltim Dongkrak Hasil Padi Pinrang hingga 9,1 Ton Per Hektare

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program Makmur kembali berhasil mendorong produktivitas hasil pertanian masyarakat, khususnya komoditas padi di Kecamatan Campa Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Keberhasilan ini ditandai panen raya padi oleh Manajemen Pupuk Kaltim bersama perwakilan Pemkab Pinrang, pada 23 Oktober 2023.

PM Agrosolution Pupuk Kaltim Yusva Sulisty, mengatakan pada program Makmur kali ini Pupuk Kaltim menggendeng Kelompok Tani Mattirowalie Kecamatan Campa, dengan luasan lahan mencapai 1.200 Hektare (Ha).

Program ini telah berjalan sejak 2022 lalu, dengan kenaikan hasil panen sebesar 2,5 ton per Ha, atau total men-

capai 9,1 ton per Ha, dari sebelumnya maksimal 6,5 ton per Ha. Hasil tersebut didapatkan dengan pengukuran ubinan seluas 2,5 x 2,5 meter persegi, dengan hasil rata-rata 6,5 Kilogram (Kg).

"Program ini didampingi langsung tim agrosolution Pupuk Kaltim, dengan pengaplikasian produk unggulan seperti NPK Pelangi 20-10-10, Pupuk Hayati Ecofert dan Biodekomposer Biodex hasil produksi Pupuk Kaltim," ujar Yusva, Senin (30/10/2023).

Menurut Yusva, sejak berjalan mulai tahun lalu, kenaikan hasil produksi padi program Makmur di Kecamatan Campa menunjukkan kenaikan signifikan, diawali panen tahap awal sebesar 8 ton per Ha. Jumlah itu terus meningkat seiring pengembangan program, hingga pada

sesi panen kali ini mampu mencapai 9,1 ton per Ha.

Hal ini menjadi bukti program Makmur mampu mendorong produktivitas hasil pertanian terintegrasi dan tata kelola lahan secara benar menggunakan pupuk non subsidi.

"Ini menjadi tujuan utama program Makmur dilaksanakan, dimana hasil pertanian masyarakat mampu ditingkatkan secara optimal, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan petani," lanjut Yusva.

Dijelaskan Yusva, Program Makmur juga digagas untuk mendorong peningkatan penggunaan pupuk non subsidi oleh petani, guna mengurangi ketergantungan akan pupuk subsidi dengan target lahan yang jauh lebih produktif. Hal ini didukung



Lanjutan Utama



berbagai produk unggulan Pupuk Kaltim yang telah teruji cocok dengan beragam jenis tanaman dan karakteristik lahan, seperti Urea Daun Buah, NPK Pelangi serta produk hayati Biodex dan Ecofert.

Sejalan dengan itu, Program Makmur pun tidak sekedar upaya meningkatkan kapasitas produksi, tapi juga mendorong penguatan kemandirian petani yang dilibatkan dalam satu ekosistem bisnis pertanian seperti off taker, distributor pupuk, penyedia benih dan pestisida, Dinas Pertanian Daerah, serta lembaga keuangan dan asuransi. Sehingga petani tidak hanya terbantu dari sisi produktivitas, namun juga memberikan kepastian pembelian hasil pasca panen hinggaantisipasi kerugian akibat gagal panen.

“Dari upaya tersebut, kemandirian petani dapat terwujud dan diperkuat melalui satu ekosistem bisnis pertanian yang saling terhubung, dan kedepannya diharap mampu mendorong kesejahteraan. Hal inilah yang terus dikembangkan Pupuk Kaltim di berbagai daerah guna membantu petani Indonesia,” tambah Yusva.

Bupati Pinrang melalui Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian Nuraini, mengapresiasi program Makmur yang dikembangkan Pupuk Kaltim untuk membantu petani dengan mendorong produktivitas hasil pertanian di daerahnya. Dikatakan Nuraini, masyarakat Kabupaten Pinrang mayoritas berprofesi sebagai petani terutama padi, dengan luas sawah produktif mencapai 50.000 Ha. Total lahan tersebut merupakan salah satu terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga adanya program Makmur Pupuk Kaltim diharap semakin membantu petani meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

“Sekitar 80 persen warga Kabupaten Pinrang mer-

upakan petani, dan program Makmur menunjukkan hasil memuaskan dalam membantu petani kami meningkatkan kesejahteraan untuk mencapai kemandirian,” ucap Nuraini.

Dirinya pun mengimbau petani Pinrang khususnya di Kecamatan Campa mulai membiasakan diri menggunakan pupuk non subsidi, melihat hasil nyata yang didapatkan pada program Makmur Pupuk Kaltim dengan kenaikan produksi cukup signifikan. Jika upaya ini terus dikembangkan, dirinya yakin petani Pinrang akan semakin sejahtera dengan hasil panen yang sangat memuaskan.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Pupuk Kaltim yang telah membantu dan mendampingi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi Pinrang, khususnya di Kecamatan Campa. Kami harap ini bisa menjadi dorongan bagi petani untuk tidak ragu menggunakan pupuk non subsidi,” tandas Nuraini.

Ketua Kelompok Tani Mattirowalie Said Gatta, pun mengaku sangat terbantu dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, karena terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan produksi padi yang dikelola anggota kelompok tani. Dirinya pun berharap program Makmur dapat terus diperluas Pupuk Kaltim, sehingga makin banyak petani yang bisa terbantu untuk mendapatkan hasil lebih maksimal.

“Program Makmur jelas sangat bermanfaat bagi petani, karena terbukti mampu meningkatkan hasil panen hingga 20 persen dari sebelumnya. Kami pun berharap program ini semakin diperluas, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh petani di wilayah lain,” tutur Said.(ADV)



Rusli, Anggota Komisi I DPRD Bontang. (Dwi)

Maraknya Pelajar Bolos Sekolah, Rusli: Pemerintah Harus Turun Tangan!

BONTANG – Butuh kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orangtua, untuk mencegah maraknya pelajar bolos sekolah akhir-akhir ini. Pemerintah pun diminta turun tangan menyelesaikan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Bontang, Rusli.

Rusli mengatakan, sangat butuh kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Selain itu kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diperlukan. Sehingga tidak hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

"Saya sudah sering ungkapkan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), jangan saling ego. Karena jika semua dibebankan pada dinas pendidikan, rata-rata tidak mungkin bisa langsung selesai," ucapnya saat dihubungi via telepon, Senin (06/11/2023).

Rusli menyampaikan, jika pemerintah hadir dalam hal ini wali kota atau wakil wali kota pun dapat mendudukan semua OPD, terkhusus pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bisa melakukan pembinaan. Masalah-masalah seperti ini tidak

akan bisa tuntas, jika tidak ada kerja sama.

"Harus diadakan sosialisasi, pembinaan kerohanian. Inshaallah bisa teratasi. Akan tetapi, jika saling melempar tugas percayalah masalah seperti ini tidak akan bisa cepat terselesaikan," paparnya.

Rusli juga berharap, pemerintah ikut campur serta lebih serius dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Banyak anggaran yang terpakai untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah, akan tetapi untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bentuk pembinaan sangat jarang dilakukan. Menjadi pemimpin itu harus kreatif, selama tidak melarang aturan.

Diketahui, belakangan ini marak pelajar kedapatan membolos sekolah. Terdapat belasan pelajar tertangkap basah Satpol PP di tempat-tempat berkumpul, seperti lapak-lapak pedagang Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang), warung kopi (karkop), Pujasera BSD, Mangrove Berbas Pantai, bahkan masih banyak lagi.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam



Ilustrasi program wolbachia. (ist)

Elnino Jadi Kendala Program Wolbachia

BONTANG – Kondisi cuaca panas terik atau yang biasa disebut elnino menjadi kendala tersendiri dalam pengaplikasian Program Inovasi Wolbachia di Bontang. Teriknya panas matahari disinyalir menyebabkan telur-telur wolbachia gagal menetas.

Hal itu diungkapkan, Kasi Surveilans, Imunisasi, Wabah, dan Bencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang Adi Permana beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, bahwa panasnya sengatan sinar matahari akan menyebabkan kapasitas air di ember-ember wolbachia menyusut. Apabila kapasitas air berkurang, maka telur-telur wolbachia di dalam ember akan sulit untuk menetas. Kalaupun menetas hanya sebagian saja.

Karenanya pihaknyamemintakepadamasyarakat, apabila menemukan ember-ember wolbachia yang posisinya terkena langsung sinar matahari, agar memindahkan posisinya. Ember-ember itu agar dipindah di tempat teduh, atau yang tidak langsung terkena sinar matahari.

“Jangan ditaruh di bawah seng. Teduh memang tapi kondisi panasnya di bawah atap seng juga bisa menyebabkan air menyusut. Juga taruh di tempat yang tidak terjangkau anak-anak,” ujarnya.

Selain itu, meletakkan ember wolbachia juga jangan di tempat yang bersemut. Lantaran di dalam ember tersebut terdapat telur nyamuk dan makanannya. Makanan yang disediakan adalah makanan ikan yang berbau sehingga mengundang serangga datang.

“Kalau didatangi semut atau serangga lain, telur-telur itu akan dimakan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, di setiap ember wolbachia terdapat 250 telur Nyamuk Wolbachia. Biasanya rata-rata yang berhasil menetas sekira 50 telur. Dari 50 telur yang menetas itu tidak semuanya betina ada pula jantannya.

“Kalau menetas 50 telur itu sudah bagus. Nanti yang sudah menetas akan terus meningkatkan populasinya di alam,” pungkasnya. (al/adv)



Ketersediaan mobil Ambulance RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

RSUD Bontang Punya 9 Ambulance untuk Gawat Darurat dan Jenazah

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang saat ini memiliki total sebanyak 9 unit Ambulance. Terdiri dari 5 ambulance untuk gawat darurat dan pelayanan kesehatan, serta 4 ambulance jenazah.

Koordinator Ambulance RSUD Bontang, Nurdiansyah mengatakan, untuk kelengkapan alat-alat kesehatan sendiri, Ambulance RSUD Bontang telah dilengkapi sesuai dengan standar Kemenkes RI.

"Ambulance RSUD Taman Husada Bontang terdiri dari 2 kendaraan Ambulance gawat darurat yang berisi peralatan kesehatan gawat darurat," katanya.

Ada tiga kendaraan ambulance yang berfungsi untuk mendukung pelayanan kesehatan pasien, yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan seperti oksigen, brankar ambulance, Scoop Stretcher.

"Ambulance gawat darurat yang berisi peralatan kesehatan gawat darurat terdiri dari emergency kit (obat-obat gawat darurat sesuai dengan standar Kemenkes). Ambulance lainnya berfungsi untuk mendukung

pelayanan kesehatan pasien yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan," sebutnya.

Ambulance digunakan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan sesuai fungsinya, dengan digunakan di dalam Kota Bontang maupun luar Kota Bontang.

"Ambulance RSUD Taman Husada Bontang selain melayani dalam kota juga melayani luar kota," tambahnya.

Sementara untuk Ambulance jenazah, RSUD Bontang memiliki empat Ambulance yang terdiri dari tiga mobil Ambulance penggerak belakang untuk melayani dalam dan luar Kota Bontang, dan satu mobil Ambulance penggerak roda depan dan belakang (four wheel drive) untuk menjangkau medan berat.

"Total kendaraan 9 Ambulance. 5 Ambulance pasien dan 4 Ambulance jenazah. Satu menggunakan kendaraan medan berat (penggerak roda depan dan belakang four wheel drive) dengan tujuan dapat melayani dan menjangkau daerah-daerah yang sulit dilalui," jelasnya. (adv/yah)



Pelatihan yang diikuti karyawan dan staf RSUD Taman Husada. (Yahya Yabo)

36 Karyawan dan Staf RSUD Bontang Ikut Pelatihan Personal Development

BONTANG – Sebanyak 36 karyawan dan staf RSUD Taman Husada Bontang mengikuti pelatihan meningkatkan personal development aparatur, dalam rangka membangun budaya kerja di Rumah Sakit yang dilaksanakan pada (3-4/11/2023) berlokasi di Hotel Astara, Balikpapan.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr Tri Ratna Paramita mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan SDM karyawan dan staf rumah sakit.

Ia mengatakan, tujuan pelatihan ini agar para pegawai mampu melakukan inovasi-inovasi dan memiliki daya saing dalam bekerja. Kemudian karyawan memiliki budaya kerja yang tinggi dan dapat bersikap profesional.

"Karyawan dapat memiliki integritas tinggi.

Karyawan juga akan memiliki daya saing dalam pelayanan kesehatan, sehingga mampu menjalankan motto dan tata nilai RSUD yang harus dibudayakan setiap hari," jelasnya.

Pelatihan diikuti semua peserta yang berasal dari semua perwakilan unit-unit yang ada di RSUD Bontang.

"Semua unit mengikuti, bukan hanya pegawai yang melayani pasien namun semua pegawai harus memiliki nilai budaya kerja yang dijalankan," katanya.

"Teman-teman ini dalam bekerja memiliki budaya yang tinggi dengan perilaku profesional. Seperti melakukan pelayanan yang cepat, efisien, sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan standar rumah sakit," pungkasnya. (adv/yah)



Salahsatu peserta yang tampil di singing contest HUT ke-21 RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

RSUD Gelar Singing Contest, Ajang Pembinaan Bakat dan Perayaan HUT ke-21

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang menggelar Singing Contest Solo Performance dalam rangka HUT RSUD ke-21, bertempat di Ruang Nusa Indah, lantai 5 RSUD Bontang, Senin (6-7/11/2023) dan akan dilanjutkan babak final pada Kamis (9/11/2023).

Direktur RSUD Taman Husada Kota Bontang, dr Suhardi, Sp. JP mengatakan, singing contest dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-21 RSUD. Di mana peserta yang mengikuti lomba berasal dari semua unit di RSUD Bontang. Ia juga mengatakan, singing contest sebagai bentuk pembinaan untuk bakat karyawan yang akan ikut lomba di luar RSUD.

"Ini juga bagian dari pembinaan talent RSUD. Nanti ada penyanyi khusus dari RSUD untuk mengikuti lomba di luar," kata dr Suhardi, Sp. JP saat pembukaan singing contest, Senin (6/11/2023).

Pelaksanaan singing contest dapat memberikan kebahagiaan bagi para karyawan dan staf RSUD Bontang. "Selamat berkompetisi, semoga dapat

memberikan kemeriahan. Dengan singing contest ini seluruh karyawan ikut merayakan suasana kemeriahan HUT ke-21 RSUD Bontang," jelasnya.

Dr Suhardi juga menambahkan, rangkaian HUT RSUD ke-21 ini dapat memberikan keceriaan pada staf dan karyawan RSUD. "Ada 23 peserta yang mewakili masing-masing unit di RSUD Taman Husada Bontang," pungkasnya.

Peserta singing contest HUT ke-21 RSUD, Mita Widiyani mengatakan, persiapan yang dilakukan sangat singkat dikarenakan dirinya juga melaksanakan kerja dalam pola shift atau bergantian. Ia mengikuti singing contest untuk memeriahkan HUT ke-21 RSUD.

"Sudah sering mengikuti di setiap HUT RSUD. Tahun ini ikut solo. Persiapannya untuk mewakili ruang keperawatan Bougenville. Ikut menggembarakan HUT ke-21 kali ini," ungkapnya.

Sementara ada tiga juri yang akan memberikan penilaian yakni Elimson Simarmata, Gita Novia dan Dina Rante. (adv/yah)



DPRD DAN PEMKAB SETUJUI RAPERDA APBD 2024 JADI PERDA



**MEDIA KALTIM KUNJUNGI PROKOPIM
BERAU, KABAG: PEMBERITAAN
SANGAT DIBUTUHKAN PEMERINTAHAN**



Bupati Berau, Sri Juniarsih dan Ketua DPRD Berau, Madri Pani saat menandatangani MoU.

DPRD DAN PEMKAB SETUJUI RAPERDA APBD 2024 JADI PERDA

TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2024.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani didampingi Wakil Ketua I, Syarifatul Syadiah dan Wakil Ketua II, Ahmad Rifai, serta jajaran Anggota DPRD Berau dan dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih, forkopimda serta OPD di lingkup Pemkab Berau.

Dalam paripurna tersebut, tujuh fraksi DPRD Berau menyetujui Raperda APBD 2024 ditetapkan menjadi Perda setelah menyampaikan pendapat akhir di ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Surat Keputusan nomor 23/2023 tentang persetujuan penetapan Raperda APBD menjadi Perda dibacakan Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman sebesar Rp 4 Triliun lebih.

Penyampaian pendapat akhir sendiri dimulai dari fraksi Nasdem yang dibacakan Darlena, fraksi Golkar dibacakan Sri Kumalasari, fraksi PPP dibacakan Suharno, fraksi PKS oleh Rahman, fraksi Demokrat dibacakan Falenti-

nus Keo, fraksi PDIP oleh Rudi Mangunsong terakhir fraksi AIR oleh Fery Kombong.

Meski tujuh fraksi menyatakan setuju, tapi ada beberapa catatan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sebagai acuan oleh setiap fraksi.

Penggunaan dan penyerapan anggaran yang maksimal menjadi catatan mayoritas dari semua fraksi. Kemudian yang selalu ditekankan DPRD adalah inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, DPRD Berau juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi tentang Perda APBD 2024. Dimana ini juga harus segera dilaksanakan setelah adanya penetapan, karena khusus untuk anggaran pelaksanaannya dari SKPD.

"Kita berharap dengan telah ditetapkannya Perda APBD 2024 ini, maka pelayanan publik juga bisa ditingkatkan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau," tegas Ketua DPRD Berau, Madri Pani menutup Paripurna. (adv/set)



Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati dan CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto saat menyerahkan cinderamata ke Kadiskominfo Berau, Didi Rahmadi.

MEDIA KALTIM SAMBANGI KOMINFO BERAU, DIDI RAHMADI: SEBUAH MEDIA ONLINE YANG UNIK

TANJUNG REDEB - Program partnership trip Media Kaltim kali ini mengunjungi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Selasa (7/11/2023).

Kedatangan tim Media Kaltim Group yang dihadiri Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto dan Direktur Media Kaltimara, Andhika Dezwan disambut hangat oleh Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi.

Dia menyebut, Media Kaltim merupakan media online yang unik. Pasalnya selain memiliki website, juga menyajikan berita-berita yang dikemas dalam koran digital atau e-paper.

"Perkembangan digital memang sudah sangat pesat, maka dengan adanya koran digital dari Media Kaltim ini sangat cocok," katanya.

Dalam pertemuan dengan tujuan silaturahmi

mi tersebut, Didi membahas seputar perkembangan media lintas platform. Sehingga, kata dia, inovasi memang harus dibutuhkan, agar tidak tertinggal oleh zaman.

"Kebetulan saya pembaca Media Kaltim, saya lihat inovasi-inovasi yang dilahirkan memang sesuai dengan perkembangan zaman," tuturnya.

Sementara, CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto juga menyampaikan hal yang sama. Dijelaskannya, inovasi yang dilahirkan berdasarkan apa yang sedang trending dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Apalagi dunia informasi saat ini bergerak dengan cepat. Tentunya tidak boleh ketinggalan," ujarnya.

Di akhir pertemuan, Agus Susanto bersama Rini Ernawati dan Andhika Dezwan memberikan cinderamata kepada Didi Rahmadi secara langsung. (dez)



Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati dan CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto saat menyerahkan cinderamata ke perwakilan Corcom Superintendent PT Berau Coal.

PARTNERSHIP TRIP, MEDIA KALTIM KUNJUNGI PT BERAU COAL

TANJUNG REDEB - Dalam rangka partner-trip ship, Media Kaltim Group menyambangi PT Berau Coal, Selasa (7/11/2023). Kunjungan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi dengan mitra kerjasama.

Media Relation PT Berau Coal, Imaduddin Al Azzam menyambut hangat kedatangan tim Media Kaltim Group yang dihadiri CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto, Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati serta Direktur Media Kaltimara, Andhika Dezwan.

Imaduddin menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Media Kaltim Group karena Corporate Communications Superintendent PT Berau Coal, Rudini Rahim tidak dapat hadir di tengah pertemuan tersebut karena sedang dalam masa cuti.

"Semoga pertemuan ini bisa menjadi ajang mempererat sinergitas. Saya selaku perwakilan, memohon maaf karena yang bersangkutan tidak dapat hadir," katanya.

Di tengah pertemuan, pembahasan soal eksistensi media online menjadi topik menarik. Terlebih, masyarakat dapat mendapat informasi secara cepat.

"Apalagi berita-berita yang disajikan media online lebih ringkas dan fleksibel. Selain itu juga masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang cepat," ujarnya.

PT Berau Coal, kata Imaduddin, selama ini kerap menjalin kerjasama dengan beberapa media yang sesuai kebutuhan korporasi.

"Semoga kerjasama dan sinergitas antara PT Berau Coal dengan Media Kaltim terus erat," tuturnya.

Lebih lanjut, CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto menjelaskan bahwa Media Kaltim lebih fokus kepada pola pemberitaan yang semuanya bisa diakses melalui smartphone.

"Bisa dikatakan mendapat informasi dalam satu genggam, itulah yang menjadi kekuatan Media Kaltim," ungkapnya.

Di akhir pertemuan, jajaran Media Kaltim Group menyerahkan cinderamata untuk Corcom Superintendent PT Berau, Rudini Rahim kepada perwakilannya, Media Relation, Imaduddin Al Azzam.

"Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan," tutup Imaduddin. (dez)



Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto serta Direktur Media Kaltimtara, Andhika Dezwan saat menyerahkan cinderamata ke Kabag Prokopim Berau, Sunarto.

MEDIA KALTIM KUNJUNGI PROKOPIB BERAU, KABAG: PEMBERITAAN SANGAT DIBUTUHKAN PEMERINTAHAN

TANJUNG REDEB - Setelah menyambangi lembaga legislatif dan swasta yang ada di Kabupaten Berau, Partnership Trip Media Kaltim berlanjut ke Kantor Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

Kunjungan dipimpin CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto yang didampingi Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati dan Direktur Media Kaltimtara, Andhika Dezwan disambut hangat oleh Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Setkab Berau, Sunarto di sela kesibukannya.

Dalam kunjungan dengan tujuan mempererat tali silaturahmi itu, banyak obrolan menarik. Sunarto menilai, media sangat berperan penting terhadap penyebaran informasi kegiatan hingga pencapaian yang diraih pemerintah daerah.

"Salah satunya Media Kaltim, yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Berau. Tentunya sudah menjadi salah satu media yang

memberi dukungan serta fungsi kontrolnya," ungkap Sunarto, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya, keberadaan media sangat dibutuhkan lembaga pemerintahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. "Apalagi sebuah media online, semua orang bisa baca dan dengan mudah tersebar hingga ke wilayah kampung-kampung yang ada," tuturnya.

CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto menjelaskan bahwa kegiatan partnertrip ship menjadi wadah menjalin silaturahmi kepada seluruh kolega dan mitra kerjasama.

"Pada prinsipnya, sinergitas harus tetap terjalin," katanya.

Di akhir pertemuan, tim Media Kaltim Group menyerahkan kenang-kenangan berupa cover koran digital atau e-paper foto Kabag Prokopim Berau, Sunarto dengan bertuliskan "Lugas, Konsisten", kemudian dirangkai dengan foto bersama. (dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

BANYAK OPD TAK HADIR DALAM PARIPURNA PANDANGAN AKHIR FRAKSI, RUDI: PADAHAL SEBAGAI UJUNG TOMBAK

TANJUNG REDEB - Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak hadir. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia menuturkan, tidak hadirnya sejumlah pimpinan atau perwakilan OPD harus jadi perhatian. Padahal, kata Rudi, rapat paripurna penyampaian akhir fraksi sangat penting.

"Tentu hal ini sangat disayangkan. Mestinya rapat paripurna pandangan akhir fraksi ini disaksikan seluruh jajaran eksekutif. Tetapi malah tidak hadir," ungkapnya sebelum membacakan notulen R-APBD Fraksi PDI-P.

Menurutnya, seluruh jajaran OPD harus hadir, sebab rapat paripurna tersebut membahas soal anggaran.

"Apalagi mereka sebagai ujung tombak pelaksana anggaran dan penanggung jawab penggunaan anggaran nantinya," ujarnya.

Rudi menjelaskan, memang pada pembahasan anggaran hanya diikuti oleh TAPD dan Banggar DPRD Berau saja. Meski begitu, ungkap dia, pelaksana pengguna anggaran tetap dijalankan oleh OPD.

"Ini masalah anggaran, walaupun mereka tidak ikut saat pembahasan, tetapi pihak OPD sebagai pelaksana anggarannya," pungkasnya. (adv/seg)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

RESPONS POSITIF AKSI PERUBAHAN RSUD ABDUL RIVAI

TANJUNG REDEB - Adanya aksi perubahan dengan Dokumen Digital Kepegawaian (Mentalwan) yang dikelola RSUD Abdul Rivai mendapat respons positif dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Ia menuturkan, langkah perubahan yang ditempuh pihak RSUD Abdul Rivai sangat baik, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Apalagi di era digital seperti saat ini, tentu berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat yang harus ditunjang dengan peralatan serta teknologi teranyar. Salah satu contohnya, saat ini

RSUD Abdul Rivai sudah memiliki alat cuci darah. Ini sebuah kemajuan," ungkapnya.

Aplikasi Mentalwan disebutkan Ratna, juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pendataan jadwal absen serta meningkatkan kedisiplinan pegawai rumah sakit itu sendiri. Selain itu juga akan tercipta transparansi informasi kepegawaian di RSUD Abdul Rivai.

"Karena sebelumnya saya juga sering mendapatkan keluhan-keluhan terkait pegawai rumah sakit yang terlambat datang untuk melakukan pelayanan masyarakat," tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

SAYANGKAN SEJUMLAH OPD TAK HADIR DALAM PARIPURNA PANDANGAN AKHIR FRAKSI

TANJUNG REDEB - Sejumlah kepala atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menilai, seharusnya para kepala OPD sadar akan pentingnya kehadiran dirinya dalam rapat paripurna tersebut.

"Khususnya OPD teknis, yang notabene sebagai eksekutor anggaran," katanya.

Padahal, lanjut Peri, setiap OPD memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda, sehingga ha-

rus hadir dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD 2024 menjadi Perda tersebut.

"Setelah menghadiri, selanjutnya bisa menentukan kebijakan prioritas program penggunaan anggaran," tuturnya.

Kendati demikian, Peri yang mewakili Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) itu menilai pembahasan anggaran sangat penting, sebab bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Catatan yang kami berikan harus dilaksanakan pemerintah daerah yang ujung tombaknya adalah OPD," tandasnya. (adv/set)



BEGINI TANGGAPAN MADRI, SOAL HASIL SURVEY PENGGABUNGAN BERAU KE KALTARA

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Utara, hasil terkait survei yang menyatakan 70 persen warga Kabupaten Berau sepakat bergabung ke Kaltara.

"Pernyataan hasil survei itu, warga Berau yang mana disurvei? angka 70 persen tidak sedikit," ungkapnya.

Madri menilai, seharusnya pernyataan hasil survei tersebut tidak dilemparkan ke masyarakat. Terlebih data yang ada dianggap belum riil sebagai representatif masyarakat Bumi Batiwakkal.

"Jangan ada klaim secara sepihak terkait persetujuan Berau untuk bergabung ke Kaltara. Hal ini bukan main-main, karena menyangkut kemaslahatan masyarakat," tuturnya.

Dikatakannya, seharusnya dalam survei yang dilakukan melibatkan stakeholder, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan hingga dua kesultanan yang ada di kabupaten paling utara Kaltim ini.

"Seharusnya Berau yang harus melakukan survei. Untuk melakukannya pun harus secara akademis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu di kemudian hari," imbuhnya.

Jika survei tersebut benar, bahwa masyarakat menyetujui penggabungan Berau ke Kaltara, maka ada hal yang harus jadi pertimbangan, yakni ibu kota harus Kabupaten Berau.

"Kalau memang masyarakat setuju untuk bergabung, silakan saja. Karena keputusan ada di masyarakat. Tetapi, pendapat saya, Berau harus menjadi ibu



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

kota. Karena dari sisi anggaran saja bisa kita lihat mana yang lebih besar," bebernya.

Selain itu, rencana pemindahan IKN yang akan membawa banyak dampak positif kepada Kabupaten Berau, juga disinggung Madri. Menurutnya, suatu kesalahan besar jika memutuskan bergabung dengan Kaltara. Maka hal itu perlu menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.

"Gubernur Kaltim, Isran Noor mengucurkan anggaran ke Berau, dari yang awalnya hanya Rp 300 miliar, saat ini berada di posisi ke dua sebagai kabupaten penerima anggaran yang cukup besar di Kaltim, yaitu Rp 500 miliar lebih," ujarnya.

"Hal itu dilakukan Gubernur kita untuk mendukung Berau sebagai penyangga IKN, diantaranya juga membenahi infrastruktur seperti jalan dan lain-lain untuk menunjang sektor pariwisata

yang akan diandalkan untuk menopang IKN," sambungnya.

Madri menilai, upaya yang dilakukan Gubernur Kaltim merupakan kontribusi nyata oleh Pemprov dalam membangun Kabupaten Berau, sehingga hal itu juga perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat Berau untuk menyetujui ataupun tidak penggabungan Bumi Batiwakkal dan Bumi Benuanta tersebut.

"Masa kita yang sudah dipersiapkan untuk menyangga IKN mau melepaskan diri begitu saja? Maka pesan saya, hati-hati dalam mengambil keputusan. Lakukan pengkajian dengan sungguh-sungguh dan melibatkan seluruh masyarakat Berau. Kalau saat ini mereka mengklaim survei 70 persen warga Berau setuju, coba kita buat juga survei pembanding yang benar-benar melibatkan masyarakat Berau seutuhnya," tutupnya. (adv/set)



Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

APRESIASI RANGKAIAN HARI JADI BERAU DAN KOTA TANJUNG REDEB

TANJUNG REDEB - Rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb yang dikemas Pemkab Berau diapresiasi Fraksi Demokrat DPRD Berau.

Hal itu disampaikan Falentinus Keo Meo dalam penyampaian Pandangan Akhir di Rapat Paripurna, Selasa (7/11/2023).

Falentinus mengungkapkan, kegiatan yang diadakan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bangkitnya UMKM.

"Setelah diterpa pandemi, kegiatan hiburan dimunculkan lagi

dengan konsep yang lebih baik dan menarik serta melibatkan banyak UMKM di dalamnya. Ini sangat positif dan baik dalam peningkatan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Dirinya berharap pada tahun-tahun berikutnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan kembali sebagai penyegaran bagi masyarakat Berau serta UMKM.

"Hiburan rakyat harus bisa terus diupayakan dengan mengevaluasi apa saja kekurangan untuk diperbaiki pada kegiatan berikutnya," pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

JIKA HYDRANT DI KAWASAN PADAT TEREALISASI, MINTA MASYARAKAT IKUT MERAWAT

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyoroti musibah kebakaran yang dalam seminggu terakhir ini telah terjadi tiga kali.

Ia mengungkapkan, kawasan padat penduduk banyak di wilayah perkotaan Tanjung Redeb. Sehingga sangat butuh hydrant untuk antisipasi kebakaran meluas.

"Hydrant penting dalam suatu lingkungan. Tapi jangan hanya memasangnya saja, tapi juga perawatannya di masa akan datang. Sehingga perlu memberikan pelatihan terhadap warga. Kan bisa menjadi bantuan yang berguna untuk petugas pemadam kebakaran," ungkapnya.

Elita berharap pembangunan sinergi dari beberapa pihak dapat

terwujud, sehingga sistem kebakaran lingkungan, proteksi kebakaran di wilayah semakin bagus untuk mengcover wilayah sekitar.

"Diharapkan jika hydrant di kawasan padat penduduk terealisasi, warga setempat turut merawat, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan bisa digunakan," katanya.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat, agar sebelum meninggalkan rumah, bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah, baik itu listrik, maupun kompor. Agar musibah kebakaran bisa diminimalisir serendah mungkin.

"Kebanyakan kebakaran yang terjadi karena kelalaiannya masyarakat juga. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua agar lebih teliti lagi," tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Fraksi NasDem DPRD Berau, Darlena saat menyerahkan notulen persetujuan R-APBD Berau tahun 2024.

BEGINI CATATAN FRAKSI NASDEM

TANJUNG REDEB - Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir, Fraksi NasDem DPRD Berau menyetujui Raperda APBD 2024 menjadi Perda. Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi NasDem DPRD Berau, Darlena di Gedung DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Darlena menyebut, ada beberapa catatan khusus yang diberikan pihaknya untuk Pemerintah Kabupaten (Pekab) Berau.

"Fraksi NasDem memberikan catatan untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan menjadi lebih baik lagi," ujar Dalena saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Pertama, meminta Pemkab Berau melakukan terobosan untuk mengoptimalkan realisasi anggaran guna menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) nantinya. "Pemerintah daerah perlu terobosan agar tidak terjadi banyaknya Silpa," jelasnya.

Kedua, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah diminta lebih menekankan asas manfaat kepada masyarakat. "Jangan lagi pembangunan lebih ke perkotaan saja. Sementara,

di daerah perkampungan sangat minim perhatian," katanya.

Ketiga, pihaknya mengingatkan kembali terkait realisasi pembangunan Jembatan Kelay III agar segera dilaksanakan. "Fraksi NasDem kembali mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan Jembatan Kelay III secepatnya diwujudkan," terangnya.

Terakhir, ungkap Darlena, rencana pembangunan yang direalisasikan nantinya harus sesuai permintaan masyarakat di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Sesuai dengan jargon bupati, uang rakyat untuk rakyat, maka hasil pembangunan harus merata di seluruh Kabupaten Berau tanpa terkecuali," tegasnya.

Kendati demikian, dirinya berharap dengan ditetapkannya RAPBD, dapat membawa perubahan kepada Kabupaten Berau yang lebih baik lagi.

"Kami Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Perda," tutupnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Proses pembuatan motif batik khas Berau.

HARAP ADA JADWAL RUTIN PENGGUNAAN BATIK BERAU

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong pemerintah untuk maksimal melakukan pengembangan batik khas Kabupaten Berau.

Madri mengungkapkan, dirinya sangat mendukung seluruh hal yang menjadi program. Namun, harus dijalankan secara konsisten.

Menurutnya, diperlukan sosialisasi dalam mengaplikasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggunaan batik khas Berau.

"Setelah itu, menurut saya tentunya akan ditiru oleh instansi vertikal lain ke depannya," katanya.

Terlebih penggunaan batik khas Berau telah termaktub pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 tahun 2021.

"Kalau sudah ada Perbupnya, penggu-

naan batik khas Berau perlu diterapkan dan dijadwalkan di setiap OPD. Seperti setiap Kamis atau Jumat wajib mengenakan baju batik," tuturnya

Dengan begitu, lanjutnya, program yang ditetapkan pemerintah bisa konsisten dan berkesinambungan dengan aturan yang ada.

"Jadi kebijakan penggunaan batik khas Berau, tidak hanya sesaat saja," ujarnya.

Madri berharap dengan diterapkannya hari untuk memakai baju batik khas Berau bisa berdampak pada perekonomian, khususnya pengrajin batik.

"Selain bisa dikenal orang luar luar dan batik khas Berau bisa meningkatkan kesejahteraan pengrajin. Tentu jadi ajang promosi juga," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman.

AGAR TINGKAT KEAMANAN TERJAMIN, DPRD SERAHKAN ARSIP BERHARGA KE DISPUSIP BERAU

TANJUNG REDEB - Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman pada Senin (6/11/2023) lalu menyerahkan beberapa arsip berharga milik DPRD Berau kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau.

Dia menerangkan, penyerahan arsip tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan arsip yang sangat penting serta mengandung nilai sejarah.

"Ini upaya antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Misal, seperti kejadian kebakaran gedung penyimpanan arsip DPRD Berau beberapa waktu lalu. Jangan sampai arsip ini hilang," jelasnya.

Dirinya mengatakan, dokumen merupakan suatu rangkaian sejarah dalam melaksanakan seluruh kegiatan di DPRD. Untuk itu, dokumen tersebut sudah dipersiapkan dan dipisahkan, mulai

dari awal hingga akhir.

"Karena tupoksi DPRD sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan, maka arsip ini sangat penting. Dari arsip yang ada bisa diketahui apa-apa saja kegiatan, kebijakan, aturan bahkan Perda yang sudah dibahas dan disahkan bersama Pemkab Berau," ujarnya.

Abdurrahman berharap, dengan adanya aplikasi baru yang diluncurkan oleh Dispusip Berau ini, maka akan memudahkan untuk memisahkan arsip aktif, non aktif dan arsip yang mengandung nilai sejarah.

"Diserhkannya arsip ini juga selain sebagai bank data arsip, juga bisa diamankan dan dilestarikan karena ini mengandung nilai sejarah. Selain itu, tingkat keamanannya terjamin, karena setiap saat ada petugas yang merawat arsip ini," tutupnya. (adv/set)



MUNCUL BUAYA DI PANTAI BALIKPAPAN, POLISI AIR IMBAU WARGA TIDAK BERMAIN DI PANTAI



**KOMISI I GELAR RDP DENGAN
BAWASLU DAN KESBANGPOL**



Personel Dit Polairud Polda Kaltim saat memberikan imbauan kepada masyarakat pesisir pantai Balikpapan.

MUNCUL BUAYA DI PANTAI BALIKPAPAN, POLISI AIR IMBAU WARGA TIDAK BERMAIN DI PANTAI

BALIKPAPAN - Sebuah rekaman video masyarakat yang merekam kemunculan 2 ekor buaya di pantai yang berada di kawasan Sepinggian, Balikpapan Selatan dalam beberapa hari ini ramai di media sosial.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, personel Dit Polairud Polda Kaltim pun memberikan edukasi serta imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut, yakni mulai dari pantai Bandara SAMS Sepinggian dan Trakindo lama.

"Kita beri imbauan tersebut menyasar ke Kelurahan Seping-

gan Raya dan Kelurahan Damai," ujar PS Panit 2 Binmas Air Dit Polairud Polda Kaltim, Bripta Taufik Ismail, Selasa (7/11/2023).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, pihaknya menyambangi satu per satu warga masyarakat beserta anak-anak yang bermain di pesisir pantai Bandara Sepinggian dan Trakindo lama dengan memberikan imbauan keselamatan bahwa wilayah tersebut saat ini sering muncul buaya.

"Dengan adanya informasi munculnya buaya di area tersebut, diharapkan masyarakat bisa menyampaikan ke teman atau saudaranya, agar tidak bermain

atau mandi laut di area tersebut," jelasnya.

Tak hanya itu, peran aktif warga dalam memberikan laporan atau informasi juga penting untuk memudahkan polisi dalam melakukan pencegahan berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas maupun tindakan kriminal.

"Dengan terjalannya silaturahmi yang baik antara kami dengan warga sekalian kiranya bersama kita dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi kenyamanan bersama," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



RDP Komisi I DPRD Balikpapan bersama Bawaslu dan Kesbangpol di ruang komisi, Selasa (7/11).

KOMISI I GELAR RDP DENGAN BAWASLU DAN KESBANGPOL

BALIKPAPAN - Komisi I DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan di ruang komisi, pada Selasa (7/11/2023).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah dan hadir Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti bersama jajaran pengurus.

"Dalam pertemuan ini membahas beberapa hal, salah satunya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Hibah Kantor Bawaslu Balikpapan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ketua Komisi I DPRD Balikpapan usai RDP.

Laisa menyebut, untuk NPHD kegiatan Pilkada 2024 memang belum mendapatkan tanda tangan dari Wali Kota, terakhir tanggal 10 November tetapi semua telah disiapkan.

"Insya Allah anggaran telah 100 persen disiapkan, kalau tidak salah Pilkada dimajukan

di September 2024, dan daerah lain sudah mendapatkannya," jelasnya.

Begitu juga soal hibah kantor Bawaslu Balikpapan yang sampai saat ini statusnya mengontrak bangunan gedung di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai Baru. Laisa mengatakan, siap untuk memperjuangkan kantor sekretariat dengan catatan mengajukan surat permohonan lagi.

"Kami minta dibuatkan surat pengajuan yang baru, sambil surat yang lama dicari. Nanti, kita diskusikan dengan pemerintah daerah," tambahnya.

Bawaslu juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggara pemilu yang saat ini jumlah TPS ada sekitar 2047. "Untuk BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah menyiapkan semua anggaran dan BPJS sendiri ditanggung hanya untuk satu bulan saja," jelasnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan H Kamaruddin Ibrahim melaksanakan Dialog Warga di RT 37 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan kota, Senin (6/11/2023) malam.

GELAR DIALOG WARGA, KAMARUDDIN TAMPUNG ASPIRASI WARGA BUKIT CINTA

BALIKPAPAN - Puluhan warga di RT 37 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota mendatangi Dialog Warga yang digelar oleh anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan H Kamaruddin Ibrahim yang dilaksanakan di RT 37 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan kota, Senin (6/11/2023) malam.

Kamaruddin Ibrahim menyampaikan, program Dialog Warga ini merupakan gagasan DPRD Kota Balikpapan untuk menjalin komunikasi dengan warga. Ini dilakukan sebagai fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap warga bisa lebih maksimal.

"Tujuannya adalah anggota DPRD semakin dekat dengan warganya. Sehingga lebih mudah menjalin komunikasi dengan warga terkait dengan program-program DPRD yang sudah dilaksanakan maupun yang belum. Termasuk keluhan-keluhan warga kita tampung semua," ujarnya.

Dengan mengusung tema "Peran Aktif Warga Dalam Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Penyangga IKN" Kamaruddin Ibrahim berharap, agar warga Kota Balikpapan bersiap menghadapi IKN seperti adanya kemacetan, penambahan penduduk dan kurangnya air bersih.

"Jika kita persiapkan diri dengan matang akan berdampak positif seperti UMKM akan maju, maka kita harus bisa memanfaatkan situasi jangan hanya jadi penonton," jelasnya.

Berbagai keluhan disampaikan mulai dari tempat pembuangan sampah di kawasan

Bukit Cinta, infrakstruktur jalan, air bersih dan antrian BBM.

Edy warga RT 37 menyampaikan, bahwa perbaikan jalan di daerah Bukit Cinta ini sudah bagus, tetapi dalam 6 bulan terakhir ini warga kembali kepada kebiasaan buruk, yakni membuang sampah sembarangan di wilayah ini.

"Meminta solusi apa yang akan dilakukan pemerintah, karena saat ini warga mulai buang sampah di sini lagi," ujarnya.

Erwin, warga RT 37 menyampaikan, hampir selama 21 tahun tinggal di wilayah Balikpapan Tengah ini dirinya belum ada menikmati air bersih dari PDAM. "Rata-rata warga disini beli air tandon, kasihan mereka hanya berharap air hujan," tambahnya.

Menanggapi keluhan para warga tersebut, Kamaruddin Ibrahim mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan. "Persoalannya warga harus menyediakan lahan, sehingga masyarakat nantinya membuang sampah pada tempatnya. Karena mayoritas yang buang sampah bukan warga sini," ujarnya.

Dan terkait permasalahan pemasangan air bersih, dirinya akan meneruskan ke pihak PDAM. Karena dirinya juga belum mengetahui alasan apa yang diberikan. "Jika memberikan asumsi nanti tidak sesuai dengan alasan PDAM. Maka aspirasi ini akan saya tanyakan ke PDAM," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI RABU
8 NOV 2023



DPRD INGIN HASIL MEMBATIK JADI PELUANG PENDAPATAN BAGI WARGA PASER

**DPRD PASER CARI CARA LEPAS
512 HEKTARE LAHAN HPL JADI HAK MILIK**





Pelatihan membatik



Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso

DPRD INGIN HASIL MEMBATIK JADI PELUANG PENDAPATAN BAGI WARGA PASER

PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar turut menyediakan wadah bagi masyarakat agar kompetensi dan pelatihan berdampak bagi perekonomian.

Hal itu diutarakan mengingat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Paser tengah melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lewat pelatihan membatik.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso menyatakan, pentingnya hal itu sebagai satu kesatuan dari Pemkab Paser terhadap masyarakat yang tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga bisa menjadi pendapatan.

"Dari pelatihan membatik yang diberikan, sepertinya perlu juga diupayakan agar hasil membatik dari pelatihan ini menjadi pendapatan baru bagi para peserta pelatihan," kata Edwin.

Untuk diketahui, Disperindagkop-UKM Kabupaten Paser tengah memberikan pelatihan teknik dasar membatik kepada 40 orang. Hal itu dilakukan guna menambah keterampilan warga sekitar yang semakin berdaya saing kedepannya.

Pelatihan kepada 40 orang itu, rinciannya 30 orang dari Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam dan 10 orang warga Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang. Peningkatan kapasitas SDM ini dilaksanakan selama 5 hari atau sejak awal November.

Adapun pelatihannya diajari langsung oleh Suliono pengrajin batik dan pemilik Rumah Batik Tunjung Langit khas Paser. Pelatihan itu katanya bagian dari pembinaan kepada masyarakat dalam menumbuhkan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Menanggapi hal itu, Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, Yusuf menyebut, saat ini masih sifatnya memberikan pelatihan dasar membatik. Harapan ke depannya dapat terus ter-

laksana di tiap kecamatan.

"Dan mudah-mudahan corak batik dari masing-masing kecamatan itu ada filosofinya," tuturnya.

Perihal pemasaran batik hasil buatan jemari warga dalam pelatihan, pihaknya mengaku siap memfasilitasi atau memberikan ruang dalam hal penjual. Tapi dengan pelatihan itu diterangkannya dapat dikembangkan menjadi usaha ke depannya.

"Siapa tahu dari mereka ada yang memiliki keinginan untuk mengembangkan batik menjadi usaha. Pada dasarnya kami ingin kawan-kawan (peserta pelatihan) bisa berkarya dan memproduksi dari keterampilan yang dimiliki dalam membatik," harapnya.

Sekadar diketahui, pada tahun lalu Disperindagkop-UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Paser sukses memberikan pelatihan membatik kepada 34 warga. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Salah satu kawasan HPL di Kecamatan Tanah Grogot

DPRD PASER CARI CARA LEPAS 512 HEKTARE LAHAN HPL JADI HAK MILIK

PASER - Seluas 512 hektare lahan berstatus Hak Pengelolaan (HPL) kawasan transmigrasi di Kecamatan Tanah Grogot tengah diupayakan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser untuk dihapus.

Upaya itu dilakukan dengan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Tujuan dari penghapusan HPL ini, agar hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL menjadi hak milik.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Hendrawan Putra menjelaskan, status HPL di beberapa titik menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk melaksanakan pembangunan, sehingga hal itu tengah diupayakan.

"Selama masih berstatus HPL, sehingga masyarakat tidak bisa membuat sertifikat," kata Hendrawan Putra.

Dijelaskan Hendra, dahulu pada 1986 lalu, Pemkab Paser mengajukan ke Pemerintah Pusat agar lahan seluas 512 hektare yang terpusat di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot itu dijadikan lokasi HPL untuk program transmigrasi.

Sekarang ini, lokasi yang dulunya diajukan sebagai HPL itu sudah berkembang dan padat penduduk. Sehingga tengah diupayakan pengembalian agar masyarakat maupun Pemkab Paser memiliki kepastian hukum dalam kepemilikannya.

Untuk diketahui, tanah yang berstatus HPL sebagai program transmigrasi itu sekarang sudah dilakukan pemekaran menjadi beberapa wilayah Desa yakni Desa Tepian

Batang, Desa Tapis, Jone, dan Kelurahan Tanah Grogot.

"Dengan status HPL, aset milik masyarakat maupun aset daerah yang dibangun di atas tanah tersebut tidak bisa diakui legalitasnya," kata dia.

Dari hasil konsultasinya, diterangkan Hendrawan, Kemendagri RI menyarankan agar pelepasan lahan tersebut dari status HPL bisa dilakukan, dengan syarat Pemkab Paser harus mengganti lahan baru yang luasnya sama dengan lahan yang berstatus HPL tersebut.

"Kemendagri setuju melepas status HPL dengan syarat diganti seluas tanah yang dihapus," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Paser, Fahmi Fadli, juga tengah mengupayakan agar status HPL menjadi hak milik karena dinilai sangat diperlukan Pemkab Paser maupun masyarakat karena di kawasan tersebut telah menjadi kawasan publik.

Pemkab Paser dan DPRD Kabupaten Paser tengah fokus dalam pembangunan, baik itu fasilitas perkantoran, permukiman warga dan fasilitas publik seperti sekolah dan gedung olahraga. Diharapkannya, dapat melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa terhambat status HPL.

"Selain itu, kepastian status kawasan ini juga akan berdampak terhadap masyarakat yang memang telah banyak mendirikan bangunan karena merasa memiliki hak dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat," ujarnya. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kabupaten Paser, Lamaluddin

DPRD MINTA PEMKAB PASER SEGERA UKUR ULANG KEBUTUHAN LAHAN TRANSMIGRASI

PASER - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Lamaluddin, bakal meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar menyelesaikan hak-hak masyarakat transmigran di Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot.

Pasalnya, masyarakat setempat mengeluhkan kejelasan lahan transmigrasi hingga kebutuhan air bersih. Itu ia dapatkan, setelah sebelumnya melangsungkan agenda serap aspirasi (reses) di daerah pemilihan (dapil) nya.

"Banyak masyarakat yang menyampaikan ke saya bahwa, mereka punya sertifikat tapi lahannya tidak ada, itu yang jadi permasalahannya," kata Lamaluddin.

Perlunya segera diselesaikan hal tersebut, menurutnya agar persoalan lahan tidak menjadi polemik di kemudian hari. Terlebih dalam segi aturan, wilayah transmigrasi sudah diakui oleh pemerintah sehingga masyarakat transmigrasi berhak memperoleh hak-haknya.

"Seperti memperoleh dua hektare lahan untuk dikelola dalam satu kepala keluarga, aturannya juga sudah jelas. Cuman sampai

sekarang, ada masyarakat yang tidak memiliki lahan itu," tambahnya.

Lamaluddin menginginkan agar Pemkab Paser bisa kembali mengukur kuota lahan yang tersedia, di wilayah transmigrasi Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot. Hal ini guna memastikan ulang kebutuhan luas wilayah.

"Kalau masalah siapa pemilik lahannya, itu belakangan yang jelas petakkan dulu mana kawasan transmigrasi agar tidak tumpang tindih dengan lahan milik warga lokal," imbuhnya.

Diungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama sejak tahun 1981 hingga sekarang ini yang belum ada penyelesaiannya. Ia juga menekankan, agar tidak boleh ada lagi Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan lantaran sudah memiliki sertifikat.

"Ini yang mesti ditertibkan pemerintah, ada sekitar 500 kepala keluarga di sana dan hampir 40 persen masyarakat tidak mengetahui di mana letak tanahnya yang ada di sertifikatnya," ulasnya. (ADV)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



BARU SEBULAN JADI BANDAR SABU, PRIA INI DICIDUK BNNP KALTIM

HONORER
DIHAPUS



PENGHAPUSAN HONORER, SAMSUN:
MASIH SANGAT DIBUTUHKAN DI KALTIM



Pelaku inisial AL musnahkan sabu dan ekstasi. (Media Kaltim)

BARU SEBULAN JADI BANDAR SABU, PRIA INI DICIDUK BNNP KALTIM

SAMARINDA- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil mengungkap satu jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Samarinda untuk dilakukan pemusnahan Barang Bukti (BB).

Pada 11 Oktober 2023, BNNP Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dikawasan Jalan Kahoi Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kumpang, terdapat kegiatan peredaran narkotika jenis sabu.

Dari penindakan pertama, tim mengamankan seseorang berinisial RB yang kedapatan membawa 10 bungkus poket sabu siap edar.

"Tim melanjutkan pengembangan terhadap pelaku lain. Berdasarkan pengakuan RB, di mana sabu yang ada padanya didapat dari seseorang berinisial RM," jelas Kasi Plt Intelijen Dwi Wibowo, Selasa (7/11/2023).

Kemudian, di hari yang sama tim BNNP

Kaltim mendapati RM di sebuah tempat Billiard di Jalan Antasari. Hasil penggeledahan terdapat 9 poket sabu, yang disimpan dalam dompet kecil, 1 unit handphone yang digunakan untuk komunikasi dengan konsumen.

"Hasil dari pengembangan yang didapatkan dari keterangan RM, ia diberikan narkotika diketahui berinisial AL," ujarnya.

Diketahui, 9 bungkus plastik kecil berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, dengan berat 4.87 gram.

AL langsung diamankan di kediamannya Jalan Kahoi. Dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 44.05 gram, dan 1 unit handphone.

"Pelaku serta seluruh barang bukti diamankan di BNNP Kaltim. Barang bukti pun dimusnahkan. AL adalah bandar sabu," tutup Dwi.

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Kegiatan Upgrading Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur, di Balikpapan beberapa waktu silam (adpim)

DBOD KALTIM DIKRITIK, DPRD SEBUT TIDAK ADA LANDASAN HUKUM

SAMARINDA - Pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) Kaltim menuai kritik dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub. Ia menilai, tidak ada landasan hukum yang jelas untuk membentuk lembaga tersebut.

DBOD Kaltim merupakan tindak lanjut dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. DBOD Kaltim diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, dan mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Rusman mengaku, sampai saat ini ia belum mengetahui adanya Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pembentukan DBOD Kaltim. Ia menganggap, hal ini sangat penting untuk mengatur fungsi, peran, dan anggaran dari lembaga tersebut.

"Kita tidak pernah tahu, landasannya berdasarkan apa? Pergub mana? Perda mana? Ini sangat penting, karena nanti akan berimplikasi pada alokasi anggaran," katanya di hadapan awak media, Selasa (7/11/2023).

Politisi PPP tersebut juga menyoroti

fungsi DBOD Kaltim yang seharusnya hanya sebagai tim koordinasi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang DBON. Ia menyarankan, pihak yang terlibat di DBOD Kaltim harus berasal dari unsur pemerintah.

"Seharusnya ini lembaga plat merah, bukan seperti yang sekarang. Tapi saya tidak mau buru-buru menyimpulkan, kita lihat dulu aturan mainnya," ujar Rusman.

Rusman berpendapat, DBOD Kaltim tidak perlu menjadi lembaga teknis yang melaksanakan kegiatan olahraga, karena itu sudah menjadi tugas lembaga olahraga lainnya, seperti KONI. Ia mengharapkan, DBOD Kaltim lebih fokus pada monitoring kebijakan olahraga di Kaltim.

"DBOD Kaltim tidak perlu meniru lembaga teknis, karena itu akan tumpang tindih dengan lembaga olahraga lainnya. DBOD Kaltim harus lebih ke arah monitoring kebijakan olahraga," tutup Rusman. (Eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud

DANA PEMPROV KALTIM HARUS SELESAIKAN MASALAH PENDIDIKAN

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diminta untuk memanfaatkan dana yang dialokasikan ke setiap daerah untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Benua Etam. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.

Hasanuddin mengatakan bahwa pendidikan adalah sektor yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Namun, ia mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan di beberapa daerah di Kaltim yang masih sangat memprihatinkan.

"Ada sekolah yang jumlah guru dan ruang belajarnya sangat kurang, ada yang fasilitasnya tidak memadai, seperti tidak ada laboratorium atau pusat penelitian. Ini harus segera ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim

dengan bantuan dana dari Pemprov," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga berharap agar dana yang disalurkan oleh Pemprov Kaltim dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Ia menilai bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Kaltim.

"Kami mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah mengalokasikan dana untuk pendidikan, tetapi kami juga mengingatkan agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat," tegasnya. (Eky/Adv/DprdKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

HONORER DIHAPUS



ilustrasi honorer (eky/mediakaltim)

PENGHAPUSAN HONORER, SAMSUN : MASIH SANGAT DIBUTUHKAN DI KALTIM

SAMARINDA - DPRD Kaltim menolak rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan bahwa tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di Kaltim dan merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jika tenaga honorer dihapus tanpa ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan keistimewaan kepada Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kaltim ini bisa jutaan perut yang bergantung pada tenaga honorer. Mereka punya istri, anak, bahkan orangtua yang menjadi tanggungan. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan," kata Samsun, Selasa (7/11/2023).

Samsun menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dan tidak ada yang boleh dihentikan. Ia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berupaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami minta keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menangani masalah ini. Kami su-

dah komitmen untuk mempertahankan tenaga honorer. Pemprov Kaltim juga terus berusaha agar tenaga honorer bisa menjadi PPPK tanpa ada yang tertinggal," ujar Samsun.

Samsun juga menegaskan, anggaran daerah masih cukup untuk membayar tenaga honorer. Ia tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka bisa menjadi PPPK.

"APBD kita masih mampu untuk membayar tenaga honorer. Kami tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka bisa menjadi PPPK," tegasnya

Penghapusan tenaga honorer merupakan salah satu klausul dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.

Berdasar sejumlah sumber, jumlah tenaga honorer di Kalimantan Timur pada tahun 2022 sekitar 65.251 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.886 orang merupakan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sedangkan sisanya sebanyak 54.365 orang merupakan tenaga honorer di 10 kabupaten/kota di Kaltim.(eky/adv/dprdaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji (ist)

SISTEM IRIGASI JADI PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KALTIM

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa sistem irigasi adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kaltim. Ia meminta Pemprov Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan bendungan dan embung di beberapa daerah persawahan.

Menurut Politisi Gerindra ini, sistem irigasi yang baik akan menjamin ketersediaan air untuk mengairi sawah-sawah di Kaltim. Hal ini sangat dibutuhkan terutama saat musim kemarau yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

"Kita harus memastikan bahwa petani kita mendapatkan air irigasi yang berkelanjutan. Karena itu, saya mendesak Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan bendungan dan embung di beberapa lokasi, seperti di Kukar dan Samarinda," ujar Seno saat diwawancarai di kantor DPRD Kaltim, Senin Kemarin (6/11/2023).

Seno menambahkan, pembangunan irigasi akan menjadi salah satu program utama yang akan dikerjasamakan dengan Pem-

prov Kaltim dalam kurun waktu 2024-2025. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Kaltim tentang hal ini.

"Kami sudah menyampaikan kepada pak Pj Gubernur bahwa sektor irigasi ini harus menjadi prioritas. Karena ini akan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani kita," kata Seno.

Selain itu, Seno juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang telah memberikan berbagai bantuan kepada petani, seperti alat dan mesin pertanian, bibit, dan lain-lain. Ia mengatakan, bantuan-bantuan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi gabah di Kaltim, khususnya di Kukar.

"Program-program yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim sudah mulai membuahakan hasil. Kita bisa lihat, produksi gabah di Kukar meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Meskipun ada sedikit penurunan di akhir tahun ini karena musim kemarau, tapi kita yakin tahun depan akan lebih baik lagi," pungkas Seno. (Eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL

OK!
TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ **30% OFF**

Rp488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Mini Mantou
5 pcs



BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com